

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
TENGAH**

RENJA SKPD



**DOKUMEN RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah perlu adanya perencanaan yang matang dan sistematis agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan lancar, oleh karena itu setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mempunyai perencanaan yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan untuk masing - masing SKPD. Perencanaan tersebut baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah sebagai salah satu (SKPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah membuat Rencana Kerja (RENJA) untuk dijadikan sebagai dasar – dasar pelaksanaan pembangunan di Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Renja ini berisikan Rencana kegiatan yang diusulkan berdasarkan Renstra(RPJM) periode 2021-2025.

Dengan adanya Renja ini diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah lebih terarah dalam menjalankan tugas dan Fungsinya, sehingga dapat meraih hasil yang optimal.

Akhirnya, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Renja tahun 2025 ini, serta diharapkan semua pihak bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah bisa berjalan dengan sukses.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan hidayah dan keberkahan pada kita semua.

Tobadak, Januari 2025
Sekretaris Dewan

**SAKARAIA. K, S.Ag.
M.Pd.**

Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19731010 200003 005

DAFTAR ISI

KATA	
PENGANTAR.....	i
DAFTAR	
ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	4
2.1. Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu Dan Capaian renstra.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	8
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	11
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	15
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD.....	16
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	16
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD.....	16
3.3. Program dan Kegiatan.....	17
BAB IV. RENCANA KERJA DANPENDA.....	25
BAB V. PENUTUP.....	27

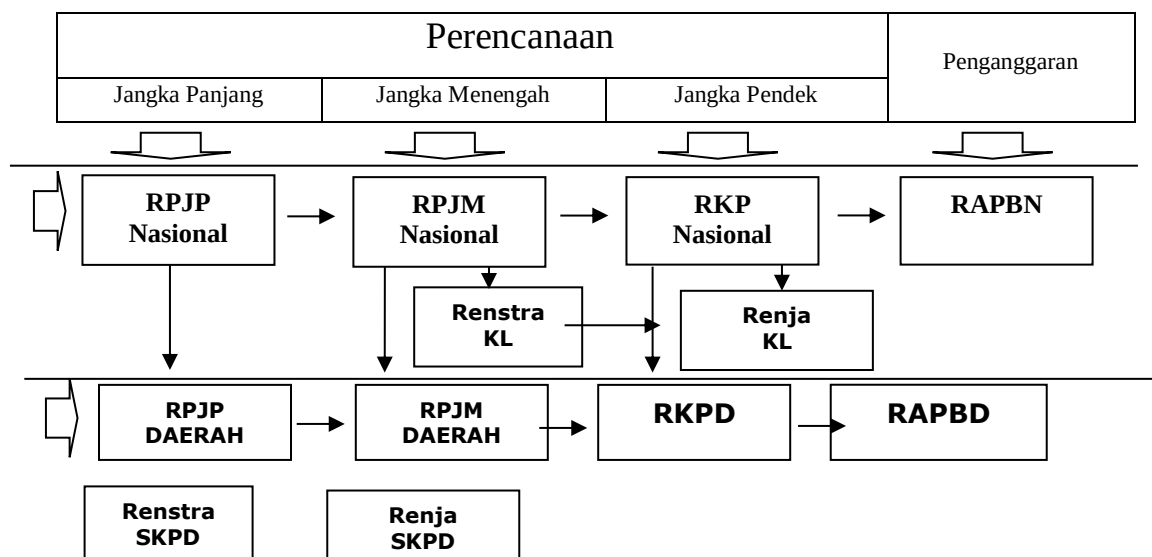
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah untuk periode 2025, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Mamuju Tengah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.

Ruang lingkup Rencana Kerja (RENJA) adalah pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dalam 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai, RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2025 dan RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2025, dengan diagram alir yang dijelaskan sebagai berikut :



1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembara Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008; perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
13. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2006 tentang Hak Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
15. Peraturan Bupati Mamuju Tengah nomor 25 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
16. Keputusan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Mamuju Tengah;
17. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2016.
18. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Kabupaten Mamuju Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran;

Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I : Berisi uraian tentang Umum, Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum Renja 2021 - 2025 dan Hubungan dengan dokumen Perencanaan Lainnya serta sistematika

BAB II: PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

Bab II : Menjelaskan tentang Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Bab III: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab IV: Menjelaskan tentang Program-program rutin dan Program-program Prioritas

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN LALU

2.1. Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu Dan Capaian renstra

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang harus disusun oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut di atas, disusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

3.1 Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.

3.2 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun sebagai penjabaran dari Renstra SKPD dan RKPD.

Untuk menjabarkan prioritas program dan kegiatan dokumen perencanaan lima tahun (Renstra) disusun matriks prioritas program dan kegiatan Renstra sebagai berikut:

Tabel 1.1.
PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2025

NO	FUNGSI/ PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN	ANGGARAN	
				ALOKASI TAHUN	
				2025	2025
1	2		3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	√	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√
	2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	√	√
	3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	√	√
	4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	√	√
	5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	√	√
	6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	√	√
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√	√
	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	√	√
	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	√	√
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	√	√
	2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√
	3.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	√	√

	4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	√	√
	2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	√	√
5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Meningkatkan kedisiplinan aparatur		
	1.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya	√	√
	2.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		√	√
6	Layanan Administrasi DPRD		Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD	√	
	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terpenuhinya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	√	√
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		MENINGKATKAN FASILITASI DAN PELAYANAN TERHADAPA KEBUTUHAN DPRD		
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	√	√
	1.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	√	√
	2.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	√	√
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Pembahasan Kebijakan Anggaran	√	
	1.	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	√	√
	2.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	√	√
	3.	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	√	√
	4.	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	√	√
	5.	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Semester	√	√
	6.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	√	√

3	Peningkatan Kapasitas DPRD		Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas DPRD	√	
	1	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	√	√
	2	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Terpenuhinya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	√	√
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		√
	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja dalam Daerah	√	√
	2	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Pelaksanaan Reses	√	√
	Fasilitasi Tugas DPRD		Terpenuhinya Fasilitasi Tugas DPRD		√
	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	√	√

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kegiatan yang menunjang pencapaian tugas dan fungsi pokok SKPD didasarkan kepada standar pelayanan minimum yang hendak dicapai meliputi penyusunan, pengawasan dan pengendalian peraturan daerah serta pembangunan. Jenis pelayanan tersebut sebagai wujud dalam menciptakan kepastian hukum serta terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Penyelenggaraan pelayanan tersebut secara efektif dan efisien akan diatur dalam program perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta pertimbangan normatif dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Jenis pelayanan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

NO	Pelayanan Dasar			Ket
	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Nilai	
1.	Ketatausahaan, kerumahtanggaan	Kecepatan, ketepatan dan keakuratan	100 %	

	dan keprotokolan	pelayanan administrasi		
2.	Adiministrasi Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	100 %	
3.	Pelayanan Legislasi dan non Legislasi DPRD, dan pelayanan masyarakat	Terselenggaranya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	100 %	
4.	Kehumasan, informasi, dokumentasi	Terdokumentasinya penyelenggaraan pemerintahan dan dewan	100 %	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Jenis pelayanan Sekretariat DPRD adalah untuk memenuhi kebutuhan:

1. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Kebutuhan ini dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD seperti kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan kantor dan pakaian dinas.
2. Mewujudkan pemberian pelayanan administrasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kebutuhan ini berkaitan dengan prosedur kerja yang baik dan memperbaiki sistem kearsipan agar tertata rapi, dengan perubahan sarana dan prasarana perkantoran.
3. Mengakselerasikan hubungan kerja yang dinamis antara Eksekutif dan Legislatif dalam setiap pengambilan keputusan Kebutuhan ini berkaitan dengan pembahasan Ranperda, Keputusan DPRD, Perda Inisiatif, partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pelaksanaan perencanaan dan pengendalian program Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD secara internal memiliki kekuatan dan kelemahan dan secara eksternal memiliki peluang dan ancaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di bawah ini dikemukakan analisis lingkungan internal dan

eksternal beserta kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD.

1. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

Berdasarkan analisis atas lingkungan internal Sekretariat DPRD, dapat dikemukakan bahwa kekuatan (*strength*) yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan

Fungsinya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dasar hukum pembentukan Sekretariat DPRD sangat kuat
2. Pejabat struktural yang mengisi jabatan structural Eselon II, III dan IV merupakan pejabat yang memiliki pengalaman yang sangat memadai.

Namun demikian, secara internal Sekretariat DPRD juga memiliki beberapa kelemahan (*Weakness*) yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya aparatur khususnya staf Sekretariat DPRD relatif masih perlu ditingkatkan;
2. Perlengkapan kantor masih terbatas ;
3. Belum tersedianya sistem informasi manajemen pengelolaan administrasi pemerintahan lembaga DPRD.

2. ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL

Selain kekuatan dan kelemahan lingkungan internal yang dimiliki Sekretariat DPRD, terdapat pula peluang dan ancaman eksternal yang harus dihadapi. Peluang (*opportunity*) Sekretariat DPRD dari faktor eksternal dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Sebagai sekretariat dari sebuah lembaga politis yang memiliki kewenangan menetapkan kebijakan, Sekretariat DPRD cukup leluasa dalam menyusun program dan kegiatan
2. Semakin mapannya peraturan perundang-undangan bidang politik khususnya yang berkaitan dengan lembaga legislatif sehingga proses

pengelolaan administrasi pemerintahan memiliki pedoman yang jelas dan pasti;

3. Kualitas sumber daya Anggota DPRD semakin membaik sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pemerintahan.

Ancaman (*threats*) yang dihadapi Sekretariat DPRD dari lingkungan eksternal dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah sekretariat dari lembaga politik, Sekretariat DPRD mendapat imbas tekanan public yang cukup berat dibandingkan SKPD lainnya;
2. Tekanan – tekanan politis dari para politisi dan atau elit partai politik pada urusan teknis Sekretariat DPRD masih cukup membebani;
3. Datangnya Anggota DPRD baru hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 memungkinkan timbulnya tekanan psikologis yang cukup berat bagi Sekretariat DPRD, baik secara teknis administrasi maupun dalam hal interaksi sosial.

Berdasarkan gambaran umum Kabupaten Lamandau, dan analisis faktor internal dan eksternal melalui pemetaan factor interaksi dalam konteks analisis SWOT, maka isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kualitas sumberdaya aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau masih perlu ditingkatkan;
Peningkatan kualitas SDM yang menjadi isu yang harus ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan SDM melalui peningkatan kemampuan administrasi umum maupun kemampuan teknis. Program pendidikan dan Pelatihan dan Bimbingan Teknis bidang manajemen pemerintahan, system informasi dan teknis pengadaan barang dan jasa masih sangat perlu ditingkatkan.
2. Pentingnya disusun standar pelayanan minimum;

Standar pelayanan minimum merupakan hal yang harus dimiliki setiap satuan kerja perangkat daerah. Dengan adanya standar pelayanan minimum maka pengukuran indikator kinerja Sekretariat DPRD semakin mudah dan akurat.

3. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah masih belum optimal;

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah perlu ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih berorientasi kepada peningkatan penguasaan peraturan perundang-undangan, penguasaan sistem perencanaan daerah, penguasaan potensi sumber keuangan daerah, dan lain-lain yang hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan Anggota DPRD tentang pemerintahan daerah.

4. Prasarana persidangan Anggota DPRD perlu ditingkatkan;

Kondisi prasarana persidangan perlu ditingkatkan dengan mengadakan peralatan yang lebih canggih agar agenda persidangan dan pemaparan materi dapat dilaksanakan lebih cepat, menarik dan akurat.

5. Belum tersedianya sistem pengelolaan data dan informasi pemerintahan berbasis IT

Penyusunan sistem informasi manajemen bidang pemerintahan, khususnya lembaga DPRD diperlukan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan publik, program kerja komisi, pengaduan masyarakat, tindak lanjut pengaduan masyarakat dan lain-lain kegiatan DPRD Kabupaten Lamandau.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2025, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD

tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Mamuju Tengah tahun 2025 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut:

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Mamuju Tengah merupakan lembaga pendukung yang keberadaannya terkait dengan keberadaan anggota DPRD Mamuju Tengah yang mempunyai sasaran utama adalah terwujudnya perencanaan, pelaksanaan dan pelayanan prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Mamuju Tengah untuk mendukung tugas pokok dan fungsi anggota dewan.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan jenis pelayanan yang diberikan kepada anggota dewan dalam hal memfasilitasi kegiatan rapat dan persidangan DPRD, kegiatan alat kelengkapan DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan/pengendalian terhadap jalannya kebijakan yang telah ditetapkan DPRD dalam pembahasan produk hukum termasuk peraturan daerah, memfasilitasi DPRD dalam penerimaan aspirasi masyarakat, dan mensosialisasikan kegiatan DPRD Mamuju Tengah, melayani kegiatan Keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan, memfasilitasi DPRD dalam pembahasan berkaitan dengan APBD (Murni, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD).

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Sekretariat DPRD Mamuju Tengah telah membuat 7 (Tujuh) program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Diharapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 dapat memenuhi tantangan dan mengatasi hambatan yang dihadapi agar kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Mamuju Tengah menjadi lebih optimal.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan mengacu pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, maka rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau adalah terwujudnya kelancaran fasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah profesional dalam mendukung kinerja DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.

Dengan terwujudnya kondisi ideal Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance akan berimplikasi secara langsung terhadap terwujudnya Visi – Misi Kepala Daerah (Bupati Mamuju Tengah).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau pada hakekatnya memberikan arah dukungan kepada Lembaga DPRD dalam perwujudan optimalisasi tugas DPRD Kabupaten Lamandau. Oleh karena itu, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola kesekretariatan dan tata kelola kelembagaan DPRD yang baik dan terpercaya;
2. Mewujudkan kualitas dan kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah secara efektif dan efisien;
3. Mewujudkan sarana dan prasarana perkantoran dan kegiatan DPRD yang akuntabel dan tepat waktu;
4. Mewujudkan kapasitas sumber daya aparatur, disiplin dan kinerja aparatur;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam

rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau sebagai berikut :

Pertama, Mewujudkan tata kelola kesekretariatan dan tata kelola kelembagaan DPRD yang baik dan terpercaya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan **sasaran** yakni:

1. Tersusunnya dokumen, data kearsipan Sekretariat DPRD dan tata kelola kelembagaan DPRD yang rapi;
2. Tersedianya data – data yang akurat dan uptodate;
3. Meningkatnya pelayanan administrasi umum.

Kedua, Mewujudkan kualitas dan kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan **sasaran** yakni:

1. Terselenggaranya kualitas kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah secara efektif dan efisien;
2. Tercapainya kinerja DPRD.

Ketiga, Mewujudkan sarana dan prasarana perkantoran dan kegiatan DPRD yang akuntabel dan tepat waktu. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan **sasaran** yakni:

1. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dan kegiatan DPRD yang akuntabel dan tepat waktu;
2. Terlaksananya kegiatan DPRD yang lebih efektif.

Keempat, Mewujudkan kapasitas sumber daya aparatur, disiplin dan kinerja aparatur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan **sasaran** yakni:

1. Tersedianya sumber daya aparatur yang dapat mengakomodasi kebutuhan DPRD;
2. Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara tepat dan akurat.

Kelima, Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan **sasaran** yakni:

1. Tersedianya kualitas sumber daya aparatur yang handal dan berkualitas ;
2. Terwujudnya pelayanan prima dalam hal administrasi perkantoran.

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

b. Rekapitulasi program dan kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tahun 2025 merupakan upaya-upaya dalam mencapai visi dan misi Pembangunan Kota Mamuju Tengah yang ingin diwujudkan pada 2021–2025 yaitu mewujudkan “Masyarakat Kota Mamuju Tengah Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021“. Sejalan dengan Program prioritas pembangunan tahun 2025 (RKPD) maka Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Mamuju Tengah ada 2 program dan 13 kegiatan, sebagai berikut:

Tabel.1.4.
PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2025

N O	FUNGSI/ PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN	PAGU INDIKATIF
1	2		3	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Rp 13.473.174.502
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp14.594.632,00
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 2.767.799
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 7.631.000,00
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 6.132.171,00
	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.771.374.299,00
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.764.143.046,00
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 7.231.253,00

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 805.743.000,00
	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rp. 234.600.000,00
	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 236.000.000,00
	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 335.143.000,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.367.547.580,00
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Rp. 9.810.990,00
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 576.465000,00
	3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 3.399.000,00
	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 58.998.240,00
	5.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 591.485.000,00
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 100.389.350,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 638.172.556,00
	1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat menyurat	Rp. 7.583.852,00
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 254.195.904,00
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.532.220.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.332.431.890,00

	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Rp.228.325.900,00
	2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp. 104.105.990,00
5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Meningkatkan kedisiplinan aparatur	Rp 7.853.967.993,00
	3.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp 7.853.967.993,00
	4.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Rp0,00
6	Layanan Administrasi DPRD		Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD	Rp 1.391.861.015,00
	1.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terpenuhinya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Rp. 203.359.425,00
	2.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terpenuhinya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Rp. 1.188.501.590,00
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp. 260.664.342,00
	1.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp. 251.698.892,00
	2.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp0,00
	3.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Rp. 8.964.750,00
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp.154.408.352,00
	7.	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Rp 32.379.662,00
	8.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 31.990.506,00

	9.	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Rp 29.400.000,00
	10.	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Rp 31.877.890,00
	11.	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Semester	Rp 16.160.294,00
	12.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp 12.600.000,00
3	Peningkatan Kapasitas DPRD		Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 575.400.000,00
	1	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp 443.400.000,00
	2	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Terpenuhinya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Rp 132.000.000,00
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp 933.048.750,00
	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja dalam Daerah	Rp 33.594.750,00
	2	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Pelaksanaan Reses	Rp. 899.454.000,00
	Fasilitasi Tugas DPRD		Terpenuhinya Fasilitasi Tugas DPRD	Rp 1.935.808.600,00
	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp 1.935.808.600,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program adalah Kumpula kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang di laksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan secretariat dewan dalam kurun waktu tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

Program-program rutin:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Apatur;
3. Program Peningkatan disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai;
5. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur;
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

Program-Program Prioritas:

1. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik;
2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi;
3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
4. Program Peningkatan Pelayanan Persidangan dan Risalah;

Kebijakan dan Program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan Pembiayaannya melalui APBD. Keberhasilan Program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja Tahunan dalam Bentuk kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Oleh karena itu, sebelum mengarah dalam penjabaran lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan perlu dilakukan disinkronisi antara tujuan, sasaran, dan strategi.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2025.

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengarahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku. Akhirnya, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Tobadak Januari 2025
SEKRETARIS DEWAN

SAKARAIA. K, S.Ag.
M.Pd.

Pangkat: Pembina TK. I
NIP. 19731010 200003 005

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DPRD KAB. MAMUJU TENGAH
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		SEKRETARIAT DPRD								19.823.885.736,00	18.472.325.752,00	17.708.071.783,00	-2.115.813.953,00				
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							19.823.885.736,00	18.472.325.752,00	17.708.071.783,00	-2.115.813.953,00					
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							19.823.885.736,00	18.472.325.752,00	17.708.071.783,00	-2.115.813.953,00					
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100 %	100 %	13.563.885.736,00	13.743.274.233,00	14.552.802.314,00	2.836.000.000,00					
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	79.000.000,00	23.531.233,00	23.531.233,00	-55.468.767,00			-	- -	Perangkat Daerah
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	2.767.799,00	2.767.799,00	-12.232.201,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -	
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -	
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -	
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	7.631.253,00	7.631.253,00	-7.368.747,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -	
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	7.000.010,00	7.000.010,00	-4.999.990,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -	
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	6.132.171,00	6.132.171,00	-3.867.829,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.451.885.736,00	1.359.950.387,00	1.773.991.228,00	322.105.492,00			-	- -	Perangkat Daerah
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	175.000.000,00	457.045.000,00	579.815.000,00	404.815.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	58.496.081,00	58.496.081,00	-41.503.919,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.100.000.000,00	294.635.000,00	591.485.000,00	-508.515.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	143.276.000,00	75.625.350,00	25.625.350,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	545.000.000,00	706.336.224,00	847.936.224,00	302.936.224,00			-	-	Perangkat Daerah	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	200 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	220.000.000,00	345.136.224,00	345.136.224,00	125.136.224,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar		
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	300.000.000,00	361.200.000,00	502.800.000,00	202.800.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	283.000.000,00	181.608.300,00	361.775.190,00	78.775.190,00			-	-	Perangkat Daerah	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	223.000.000,00	160.608.300,00	310.288.300,00	87.288.300,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																

			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	120.000.000,00	145.000.017,00	121.140.017,00	1.140.017,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				80 Dokumen	80 Dokumen	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Infrastruktur Dasar Memantapkan Infrastruktur Dasar		
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				2 Dokumen	2 Dokumen	220.000.000,00	8.964.750,00	8.964.750,00	-211.035.250,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Presentase Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran				100 %	100 %	167.000.000,00	98.833.352,00	98.833.352,00	-68.166.648,00			-	-	Perangkat Daerah	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	23.379.662,00	23.379.662,00	-1.620.338,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	18.490.506,00	18.490.506,00	-6.509.494,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	12.075.000,00	12.075.000,00	-22.925.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	16.127.890,00	16.127.890,00	-18.872.110,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	16.160.294,00	16.160.294,00	4.160.294,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	-22.400.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																

			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PR
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Presentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD				100 %	100 %	438.000.000,00	432.600.000,00	456.600.000,00	18.600.000,00			-	-	DPRD	
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				9 Orang	9 Orang	288.000.000,00	360.000.000,00	384.000.000,00	96.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				25 Dokumen	25 Dokumen	150.000.000,00	72.600.000,00	72.600.000,00	-77.400.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Presentase Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				100 %	100 %	970.000.000,00	966.999.150,00	933.048.750,00	-36.951.250,00			-	-	DPRD	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				330 Laporan	330 Laporan	150.000.000,00	67.545.150,00	33.594.750,00	-116.405.250,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		

	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD															
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				25 Dokumen	25 Dokumen	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses															
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				75 Dokumen	75 Dokumen	710.000.000,00	899.454.000,00	899.454.000,00	189.454.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Presentase Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				100 %	100 %	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	-	DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD															
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Presentase Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD				100 %	100 %	4.035.000.000,00	3.076.654.250,00	1.536.682.600,00	-2.498.317.400,00			-	-	DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				25 Dokumen	25 Dokumen	4.035.000.000,00	3.076.654.250,00	1.536.682.600,00	-2.498.317.400,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	
	J U M L A H								19.823.885.736,00	18.472.325.752,00	17.708.071.783,00	-2.115.813.953,00					

